

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Indiahono, D. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gava Media.
- Keban, Y. T. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu, Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Gava Media.
- Novial, Rully., dkk. (2018). *Strategi Menangani Overcrowding di Indonesia: Penyebab, Dampak dan Penyelesaiinya*
- Subarsono, A. (2013). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, S. A. (2002). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik: Teori & Proses*. Jakarta: Media Pressindo.
- Winarno, B. (2011). *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS.
- zaenudin, d. m. (2014). *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan Penelusuran Konsep dan Teori*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Artikel Jurnal

- Alfaridzi, M., Wibowo, P., & Pemasarakatan, P. I. (2021). *Penanganan Overcrowded Pada Lapas Narkotika Kelas IIB Banyuasin Berdasarkan Permenkumham No. 11 Tahun 2017*. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*,

8(6), 1683–1691.

Lapas, R., Hukum, M., Hak, D. A. N., Manusia, A., & Indonesia, R. (2017).
BERITA NEGARA. 969.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelit* Edika Jeremia Tarigan. 2019. Pelaksanaan
Pelayanan Kesehatan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Di
Dalam Rumah Tahanan Negara Kelas Iib Ponorogo. *Jurnal Ilmiah
Sosial*. 1(2): 94-102.

Fauzi Al Hakim dan Lushiana Primasari. 2017. Penerapan Peraturan Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang
Grand Penanganan *Overcrowded* Di Rumah Tahanan Negara Kelas I
Surakarta. 6(1) : 85-103.

Galih Puji Mulyono dan Barda Nawawi A. 2016. Upaya Mengurangi
Kepadatan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia.
Jurnal Law Reform. 12(1) : 1-16.

Irman Raka Firmansyah. 2020. Efektivitas Pelayanan Kunjungan Berbasis Online
Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang (The Effectiveness Of Online-
Based Visiting Services In Cipinang Class I Detention House). *Jurnal
Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*. Vol.7 (1): 100-111.

Maria Cathalina Corina Susanto. 2018. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Penataan
Rumah Tahanan (Studi Kasus Pelaksanaan Permenkumham No. 6 Tahun
2013 Tentang Tata Tertib Lapas Dan Rutan Dirumah Tahanan
“Medaeng”Surabaya).

Rudini Hasyim R. dan Nurul Widhanita Y. B. 2021. Kebijakan Menangani
Overcrowding Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Cendekia
Hukum*. 6(2) : 289-301.

Paisal, dkk. 2018. Kualitas Pelayanan Di Rumah Tahanan Kelas IIB Donggala.
Vol 1 (1): 1565-1576.

- Pitri Wili Ramadani. 2017. Pelayanan Terhadap Narapidana Di Rumah Tahanan (Rutan) Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. 4(2).
- Wahyu Mahmuda. 2021. Peran Pengawasan Dalam Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Kelas I Medan. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*. 8(3):. 134-143.
- Wulan Dwi Yulianti. 2021. Upaya Menanggulangi Over Kapasitas Pada Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia. *Humani*, 11(1): 163-178.
- Zefry Andalas dan Retnowati WD Tuti. 2016. Kualitas Pelayanan Tahanan Di Cabang Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi Service Quality Branch House In Custody In Combating Corruption Commission Of Prisoners. 1152-1162.

Peraturan- Peraturan

- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Grand Design Penanganan *Overcrowded* Pada Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengamanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan